

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, PENGANGGURAN DAN
UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

JURNAL



Oleh:

Nama : Teris Alfado
Nomor Mahasiswa : 20313376
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, PENGANGGURAN DAN
UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Teris Alfado

Ekonomi Pembangunan

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Email : alfadoteris@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 – 2022. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis faktor tersebut yaitu regresi panel dengan metode *estimasi fixed effect* menggunakan software *eviews 12*. Hasil penelitian, menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif tingkat Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

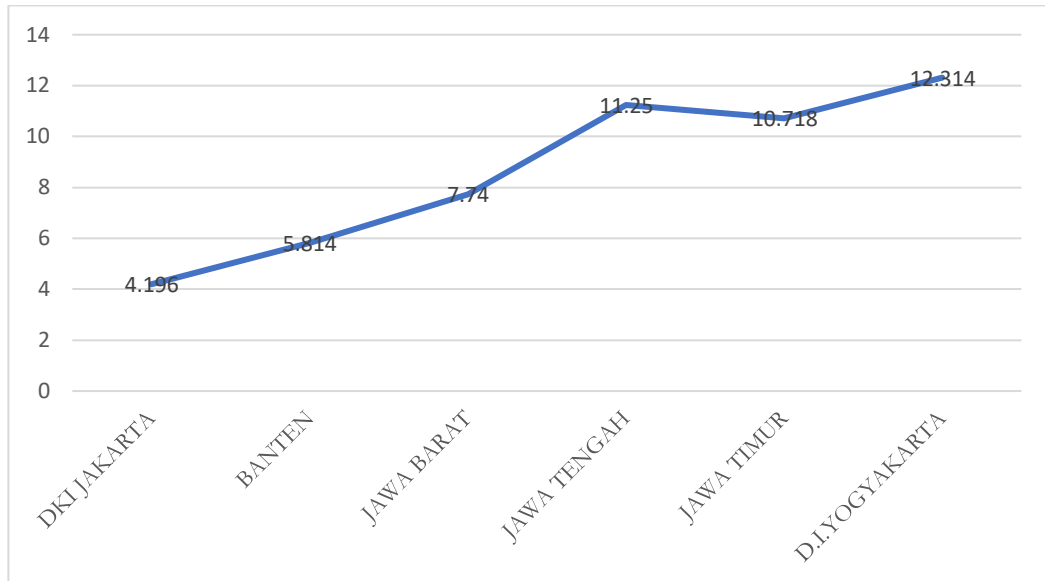
Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK)

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh negara-negara dalam tahap pembangunan di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh penduduknya. Isu kemiskinan terus menjadi fokus utama sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Permasalahan kemiskinan bukanlah hal baru dan telah menjadi isu yang ada sejak zaman dahulu. Pada masa lalu, masyarakat umumnya mengalami kemiskinan bukan hanya karena kekurangan pangan, melainkan juga akibat minimnya akses terhadap fasilitas dan sumber daya materi.

Istilah kemiskinan timbul saat individu atau kelompok tidak dapat memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum dalam suatu standar hidup tertentu. Secara tepat, kemiskinan diartikan sebagai kondisi kekurangan finansial dan barang-barang yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup (Annur, 2013). Salah satu tindakan konkret yang diambil untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui penerbitan kebijakan pemerintah melalui dokumen peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut bertujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, perkembangan ekonomi Indonesia cenderung terfokus di Pulau Jawa. Namun kenyataannya, permasalahan kemiskinan cukup signifikan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, terutama di provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.



Sumber : BPS, data diolah.

Gambar 1 Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2018 – 2022 (persen)

Berdasarkan data pada gambar 1.2 mengenai tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi kemiskinan di Pulau Jawa tidak merata. Mayoritas wilayah, seperti Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, memiliki tingkat kemiskinan di atas 10%, sedangkan Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah 10%.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi salah satu isu krusial. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan perlu menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah. Pemerintah harus bertindak sebagai penopang utama dalam proses perbaikan kualitas hidup masyarakat di bawah pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret guna mengatasi permasalahan kemiskinan secara efektif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan bahwa presentase tingkat kemiskinan paling tinggi ada pada kabupaten Kebumen sebesar 16,41% diikuti oleh kabupaten Wonosobo sebesar 16,17% dan kabupaten Brebes sebesar 16,05% sementara itu presentase kemiskinan paling rendah ada pada kota

semarang sebesar 4,25%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan antar daerah di Jawa Tengah. Selain itu, data tersebut juga menggarisbawahi perlunya strategi penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Susanti, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pengangguran berpengaruh positif sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009-2011.

Ni Made Myanti Astrini, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sementara pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

Yustie, (2017) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi data panel, hasil penelitian memperlihatkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan serta tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

Giovanni, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-

2016. Analisis data yang digunakan untuk mengevaluasi dampak faktor-faktor tersebut adalah regresi data panel. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, pada periode 2009-2016, pengangguran dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut.

C. LANDASAN TEORI

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh sifat multidimensional kemiskinan, yang berarti bahwa kebutuhan manusia memiliki beragam aspek. Dengan demikian, kemiskinan mencakup aspek utama seperti keterbatasan aset, struktur sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aspek sekunder seperti kurangnya jaringan sosial, akses ke sumber daya keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan ini tercermin dalam kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan tingkat pendidikan yang rendah. Lebih jauh lagi, dimensi-dimensi kemiskinan saling terkait secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perkembangan atau kemunduran dalam satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Selain itu, aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa individu atau komunitas yang mengalami kemiskinan, baik secara individu maupun kolektif, juga terpengaruh. Garis kemiskinan merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan dan kebutuhan non-makanan, atau standar yang menetapkan batas di mana seseorang dianggap miskin berdasarkan pola konsumsinya. Setiap negara memiliki definisi yang berbeda mengenai garis kemiskinan, sehingga tidak ada standar tunggal yang berlaku

secara umum. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi lokasi geografis dan standar kebutuhan hidup yang berbeda-beda.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Menurut (BPS, 2020), untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator strategis yang digunakan untuk mengevaluasi upaya dan performa program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. IPM dianggap sebagai representasi dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, kemajuan program pembangunan selama suatu periode dapat diukur dan tercermin dalam besaran IPM pada awal dan akhir

periode tersebut. IPM menjadi ukuran untuk menilai dampak kinerja pembangunan wilayah dengan dimensi yang sangat luas, mencakup kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, kecerdasan, dan standar hidup yang layak. Dalam perencanaan pembangunan, IPM juga memiliki peran penting sebagai panduan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, IPM juga memberikan arahan dalam alokasi anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kuncoro, (2006) mendefinisikan Pengangguran terbuka (open unemployment) sebagai jumlah total individu yang merupakan angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang mencari pekerjaan untuk pertama kali dan juga yang sebelumnya pernah bekerja. Pengangguran terbuka umumnya ditemukan di kalangan generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Mereka cenderung berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka, yang sering kali berhubungan dengan pekerjaan di sektor modern atau di lingkungan perkantoran. Mereka bersedia menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tersebut. Selain itu, mereka mungkin juga mencari pekerjaan di kota atau di daerah di mana sektor industri telah berkembang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi di wilayah perkotaan.

5. Upah Minimum

Upah minimum merujuk pada tingkat upah terendah yang diterapkan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan kompensasi kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau pekerjaan. Kebijakan gaji minimum di Indonesia diatur oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Gaji minimum mencakup bayaran bulanan terendah, termasuk gaji pokok dan tunjangan

tetap. Tunjangan tetap merujuk pada total imbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara teratur dan tetap, yang dapat terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi tertentu.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data panel dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan metode dokumentasi sebagai sarana untuk mengumpulkan data. Data-data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel yang disebut model regresi data panel dengan menggunakan alat analisis *eviews* 12.

Model penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan (persen)

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi variabel independent

X_1 = PDRB (juta rupiah)

X_2 = IPM (persen)

X_3 = TPT (persen)

X_4 = UMK (rupiah)

i = 35 kab/kota provinsi Jawa Tengah

t = Tahun 2018-2022

e = komponen error

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan model terbaik

a. Uji Chow

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	219.242707	(34,135)	0,0000
Cross-section Chi square	703.843908	34	0,0000

Dari hasil pengujian di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas Cross Section F sebesar 0,0000, menunjukkan bahwa nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 0,05. Oleh karena itu, kesimpulan dari uji Chow adalah menolak hipotesis nol (H_0). Dengan penolakan H_0 , dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test summary	Chi sq Statistic	Chi sq d.f.	Prob.
Cross-section random	35.628372	4	0.00000

Dari hasil uji Hausman yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa probabilitas pada Cross-section random adalah 0.0000, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha sebesar 5%. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hipotesis nol ditolak, dan model terbaik yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Estimasi Fixed effect

Berdasarkan hasil uji signifikansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode estimasi yang paling sesuai adalah *Fixed Effect model*.

Tabel 3 Hasil Estimasi Fixed effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58.09705	24.52474	2.368.916	0.0192
LOGX1	-4.698144	1.669935	2.813.368	0.0056
X2	0.476566	0.164548	2.896.208	0.0044
X3	0.150950	0.030203	4.997.893	0.0000
X4	-1.55E-06	7.68E-07	2.020.164	0.0453

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.991081	Mean dependent var	10.86349
Adjusted R-squared	0.988588	S.D. dependent var	3.446262
S.E. of regression	0.368147	Akaike info criterion	1.032915
Sum squared resid	18.43239	Schwarz criterion	1.738210
		Hannan-Quinn	
Log likelihood	-51.38006	criter.	1.319003
F-statistic	397.6752	Durbin-Watson stat	2.464158
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dengan demikian, persamaan regresi yang diterapkan adalah:

$$Y_{it} = 58.09705 - 4.698144X_{1it} + 0.476566X_{2it} + 0.150951X_{3it} - 1.55E-06X_{4it} + e_{it}$$

3. Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi data panel yang menggunakan *Fixed Effect Model*, ditemukan bahwa nilai *R-squared* adalah 0,991081 yang mengindikasikan bahwa sekitar 99,1081% variasi dalam variabel Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel PDRB, IPM, TPT, dan UMK. Sementara itu, sekitar 0,8919% dari

variasi tersebut dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

b. Uji F Statistic (F-test)

Dalam pelaksanaan penelitian, tujuan dari pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil uji pemilihan *Model Fixed Effect* menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 397.6818, dan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000. Nilai probabilitas F-statistik yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ ($0.000000 < 0.05$) menegaskan bahwa secara bersama-sama, variabel independen PDRB, IPM, TPT, dan UMK memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2022.

c. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji signifikansi memiliki tujuan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam hasil pemilihan *Fixed Effect Model* (FEM), perbandingan p-value pada uji t menggunakan nilai alpha (α) sebesar 5% dan sebagai standar untuk menentukan apakah hipotesis perlu diterima atau ditolak. Oleh karena itu, hasil uji ini memberikan informasi krusial mengenai tingkat signifikansi variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen.

Tabel 4 Fixed Effect Model

Variabel	<i>coefficient</i>	<i>P - value</i>	Keterangan
PDRB	-4.698780	0.0056	Signifikan
IPM	0.476511	0.0044	Signifikan
TPT	0.150951	0.0000	Signifikan

UMK	-1.55E-06	0.0454	Signifikan
-----	-----------	--------	------------

a) Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil yang telah disajikan pada tabel, ditemukan bahwa nilai koefisien PDRB adalah -4.698780 dan nilai probabilitas menunjukkan sebesar 0.0056. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ ($0.0056 < 0.05$), dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2022.

b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

Dari hasil yang telah disajikan pada tabel, ditemukan bahwa nilai koefisien IPM adalah 0.476511 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0044. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ ($0.0044 < 0.05$), dapat disimpulkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2022.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan

Dari hasil yang telah disajikan pada tabel, ditemukan bahwa nilai koefisien TPT adalah 0.150951 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ ($0.0000 < 0.05$), dapat disimpulkan bahwa variabel TPT memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2022.

d) Upah Minimum kab/kota terhadap tingkat kemiskinan

Dari hasil yang telah disajikan pada tabel, ditemukan bahwa nilai koefisien UMK adalah $-1.55E-06$ dengan nilai probabilitas sebesar 0.0454. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ ($0.0454 < 0.05$), dapat disimpulkan bahwa variabel UMK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018-2022.

F. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2018-2022. Ketika PDRB mengalami peningkatan akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2018-2022 (tidak sesuai hipotesis). Hal tersebut terjadi karena nilai indeks yang tinggi pada seseorang tidak selalu menjamin bahwa individu tersebut akan terhindar dari kemiskinan. Sebagai contoh, ketika melihat bantuan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan, belum dapat dipastikan bahwa mereka yang memiliki kualitas pendidikan yang baik akan hidup layak dan mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan serta keterbatasan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan peningkatan pengangguran, mengurangi pendapatan masyarakat, dan mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada tingkat kemiskinan.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2018-2022. Ketika TPT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan juga ikut meningkat.
4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada rentang tahun 2018-2022. Ketika UMK mengalami peningkatan akan menurunkan tingkat kemiskinan .

G. IMPLIKASI

1. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Namun, hal tersebut tidak hanya bergantung pada sebagian kecil masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi. Keseimbangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut juga merupakan parameter utama untuk mengukur kemajuan suatu daerah, Oleh karena itu, perlunya optimalisasi dan peningkatan sektor usaha di Provinsi Jawa Tengah diakui sebagai hal yang penting. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut dan meningkatkan distribusi pendapatan secara lebih merata.
2. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu untuk mewadahi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari sektor pendidikan dan kesehatan yang layak, harapannya, pemerintah dapat mengawasi ketersediaan peluang pekerjaan dan menyelenggarakan program pelatihan bagi warga guna mengurangi tingkat pengangguran sehingga tidak berkontribusi terhadap kemiskinan.

3. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, perlu menurunkan tingkat pengangguran, salah satunya dengan mempermudah proses perizinan usaha untuk meningkatkan peluang terciptanya lapangan kerja, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan kerja bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing di pasar kerja, terutama dengan fokus pada pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan khusus. Peningkatan dalam sektor pendidikan juga dapat diwujudkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja sehingga mereka menjadi lebih kompeten di dunia kerja.
4. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penerapan upah minimum harus tetap diterapkan, dan tingkat upah minimalnya perlu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM) atau kebutuhan hidup layak (KHL) guna melindungi hak-hak pekerja. Dengan adanya sistem upah minimum ini, diharapkan pekerja dapat menerima penghasilan sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko kemiskinan.

H. DAFTAR PUSTAKA

Agus widarjono. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviens edisi kelima*. UPP STIM YKPN.

Annur, R. A. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*. Dipublikasikan. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi*

Aktual, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.3>

Bintang, A. (2018). Pengaruh Pdrb, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33, 20–28.

Dian Purnama Yanthi, C., & Marhaeni. (2015). Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

Fajriah, N. A. (2021). Analysis Of The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Number Of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, And Human Development Index On Poverty In 2010-2020 East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 171. <https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.27778>

Ghozali. (2005). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (ketiga). Badan Penerbit UNDIP.

Kuncoro Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan* (4th ed.). UPP AMP YKPN : Yogyakarta., 1997.

Mangasi, P. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 104–108.

Mulyadi, M. (2016). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat Government's Role In Solving Unemployment And Poverty In Society. *Kajian*, 221–236.

Natasya Ika Putri. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3.

Ni Made Myanti Astrini, I. B. P. P. (2013). Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2.

Nia Mari, atus S., Teguh Hadi, P., & Duwi, Y. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Upah Minimum, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(2), 259–273. <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i2.4149>

- Rapika, O. :, Damanik, K., Selna,), & Sidauruk, A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358–368.
- Ridzky Giovanni. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. In *Economics Development analysis journal* (Vol. 7, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9(1), 1–18.
- Syafri, & Febrianti, P. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Pdrb, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kab:Kota Provinsi Banten. *Metrik Serial Humaniora Dan Sains*, 2, 28–34.
- Yustie, R. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Equilibrium*, 49–57.
- Zuhdiyati, N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka* , 11, 27–31.